

MANAJEMEN STRATEGIS MENGATASI GALAT PENERIMA KUR DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

LALU MUH. KABUL

Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) Mataram

email:Kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas manajemen strategis mengatasi galat penerima KUR. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data digunakan wawancara dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa galat penerima KUR terdiri dari galat eksklusif dan galat inklusif. Strategi yang digunakan untuk mengatasi galat eksklusif meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi. Sementara, sosialisasi adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi galat inklusif.

Kata kunci: Manajemen, strategi, galat

ABSTRACT

This research describes strategical management to overcome error beneficiaries of credit for people business (KUR). The research method used was qualitative. Data sources were primary and secondary data. For data collecting used interview and FGD. The research result showed that error beneficiaries of KUR consisted of exclusion error and inclusion error. Strategy that used to overcome exclusion error includes extensification and intensification. Meanwhile, socialization is a strategy that used to overcome inclusion error.

Keywords: management, strategy, error

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah dilaksanakannya Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*, disingkat MDGs) selama bertahun-tahun akhirnya pada tahun 2015 agenda pembangunan global ini resmi berakhir. Sebagai gantinya, 193 negara termasuk Indonesia, bersepakat mengadopsi agenda pembangunan baru untuk 15 tahun kedepan pada tahun 2030 yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 2030) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebelumnya pada MDGs ada 8 tujuan dan 60 indikator. Pada SDGs 2030 jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17 tujuan dan 232 indikator (SMERU, 2017). Dalam pada itu, tujuan pertama baik pada MDGs maupun SDGs 2030 adalah penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Bahkan telah dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat pusat (TNP2K) maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota (TDP2K) sebagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan kategori rumah tangga miskin, TNP2K melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 disingkat PPLS 2011 (BPS, 2011) dan sekitar 45%-50% rumah tangga menengah ke bawah dicacah melalui PPLS 2011. Hasil PPLS 2011 digunakan oleh TNP2K dan TDP2K dalam menentukan strategi intervensi program penanggulangan kemiskinan. Dengan mengkombinasikan program penanggulangan kemiskinan tersebut dengan "*ikan, pancing, dan perahu*", maka diperoleh 3 (tiga) strategi intervensi program penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, program memberikan "*ikan*", yakni bagi rumah tangga yang tergolong dalam kategori "*sangat miskin*" diberikan program bantuan langsung berbasis rumah tangga seperti beras untuk warga miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), Biaya Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain. *Kedua*, program mengajari masyarakat “memacing” yakni pemberdayaan rumah tangga yang tergolong dalam kategori “miskin” melalui program pemberdayaan berbasis kelompok meliputi PNPM Perkotaan, PNPM Perdesaan, PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, PNPM PISEW, PANSIMAS, dan lain-lain. *Ketiga*, membantu masyarakat agar rumah tangga yang tergolong “hampir miskin” mempunyai “pancing” dan “perahu” sendiri melalui program kredit berbasis usaha mikro dan kecil, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2018 secara nasional dari 41 instansi penyalur KUR terdapat tiga perbankan penyalur KUR terbesar yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan BNI. Target total plafon KUR secara nasional pada tahun 2018 mencapai Rp.120 triliun dan sejumlah Rp.79,744 triliun (66,45%) disalurkan oleh BRI, sebesar Rp.14,560 triliun (12,13%) oleh Bank Mandiri dan Rp.13,440 triliun (11,20%) oleh BNI dan sejumlah Rp.12,256 triliun (10,21%) disalurkan oleh 38 instansi lainnya seperti Bank Pembangunan Daerah termasuk Bank NTB, Bank Umum Swasta, Koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Dari target total plafon KUR pada tahun 2018 yang mencapai Rp.120 triliun sebesar Rp.116,03 triliun (96,69%) dialokasikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (Anonim, 2018). Ruang lingkup penelitian ini adalah KUR yang disalurkan oleh BRI Cabang Selong di Kabupaten Lombok Timur.

Mengacu pada hasil kajian Hastuti et al (2016) diperoleh bahwa PPLS 2011 memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya pada PPLS 2011 cakupan rumah tangga lebih luas, SOP (*standard operating procedure*) lebih jelas, tersedia daftar rumah tangga awal sebagai patokan berdasarkan analisis teknis atas dasar sensus, pendataan tidak dikaitkan dengan program tertentu, dan informasi yang dikumpulkan tentang rumah tangga lebih terperinci. Disisi lain, kelemahan pada PPLS 2011 adalah desain program dianggap terlalu sentralistik dan/atau kurang mengakomodasi kriteria sosil-ekonomi, sosialisasi program terbatas, dan ada indikasi bahwa beberapa rumah tangga miskin tidak terdatadalam hal daftar rumah tangga awal, cukup banyak rumah tangga menengah keatas yang tercakup didalamnya. Sebaliknya banyak juga rumah tangga yang tergolong menengah kebawah, tetapi dicoret dari daftar awal.

Kelemahan pada PPLS 2011 tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau galat (*error*) meliputi galat inklusi (*inclusion error*) dan galat eksklusi (*exclusion error*) (Hastuti et al, 2016). Dalam konteks KUR, galat inklusi berkaitan dengan rumah tangga “non-hampir miskin” yang bukan menjadi penerima KUR (debitor), tetapi menjadi debitor. Sementara, galat eksklusi berkaitan dengan rumah tangga “hampir miskin” yang menjadi penerima KUR (debitor) tetapi tidak menjadi debitor. Galat penerima KUR tersebut berkaitan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dengan adanya galat dimaksud, maka kemiskinan tidak hanya semakin dalam, tetapi juga semakin parah. Kemiskinan yang semakin dalam ini ditunjukkan oleh naiknya Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Povertry Gap Index/PGI*) di Lombok Timur dalam periode 2013-2015 dan periode 2016-2017.

Dalam periode 2013-2015, PGI Lombok Timur naik dari 2,58 pada tahun 2013 menjadi 2,68 pada tahun 2014 dan 3,36 pada tahun 2015. Dalam periode 2016-2017, PGI Lombok Timur naik dari 2,88 pada tahun 2016 menjadi 3,03 pada tahun 2017. Disisi lain, kemiskinan yang makin parah ditunjukkan oleh naiknya Indeks Keparahakan Kemiskinan (*Povertry Severity Index/PSI*) di Lombok Timur dalam periode 2013-2015 dan periode 2016-2017. Dalam periode 2013-2015, PSI Lombok Timur naik dari 0,54 pada tahun 2013 menjadi 0,61 pada tahun 2014 dan 0,87 pada tahun 2015. Dalam periode 2016-2017, PSI Lombok Timur naik dari 0,68 pada tahun 2016 menjadi 0,79 pada tahun 2017 (BPS Lombok Timur, 2017).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme penyaluran KUR oleh BRI Cabang Selong?, (2) Sejauh mana terjadinya galat penerima KUR yang disalurkan oleh BRI Cabang Selong?, (3) Apa manajemen strategis yang dapat dirumuskan untuk mengatasi galat tersebut?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mendeskripsikan mekanisme penyaluran KUR, (2) menganalisis terjadinya galat penerima KUR, (3) merumuskan manajemen strategis untuk mengatasi galat penerima KUR.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif meliputi empat paradigma, yaitu *positivism*, *post positivism*, *critical theories*, dan *constructivism* (Hidayat DN, 2002; Budiyanto, 2002 dan Denzin dan Lincoln, 2009). Realitas sosial yang digali dalam penelitian ini, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fokus pada mekanisme penyalurannya, galat penerima, dan manajemen strategis untuk mengatasi galat. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan paradigma *constructivisme* dikaitkan dengan dengan pertimbangan secara ontologis (sifat realita) bahwa realitas sosial adalah wujud bentukan (konstruksi) individu-individu subyek yang terlibat dalam penelitian. Secara metodologis, proses penelitian ini bersifat induktif yang berorientasi pada pengembangan pola dan teori untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat kontekstual atas suatu kejadian atau gejala sosial (Creswell, 2010).

Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan. *Informan* dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik yang harus mewakili kondisi populasi untuk kepentingan generalisasi populasi, melainkan subyek penelitian yang dipilih sesuai dengan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu pengembangan konsep/teori (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini dipilih informan dengan teknik *snowball* dimana dipilih informan awal secara “purposive” pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*keyinformant*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk informan lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk lagi informan lain yang dapat memberikan informasi dan informan ini pula diminta lagi untuk menunjuk informan lain yang dapat memberikan informasi; demikian seterusnya.

Sumber data primer diperoleh dari informan melalui *participant observation*, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). Sumber data sekunder diperoleh dari BRI Cabang Selong, Bappeda Lombok Timur, BPS Lombok Timur, TDP2K Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Lombok Timur, dan lain-lain. Lokasi penelitian ini meliputi daerah pedesaan, yakni Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat dan daerah perkotaan, yakni Kelurahan Selong Kecamatan Selong. Untuk menguji apakah data yang dikumpulkan absah (*valid*) dilakukan triangulasi.

Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dimulai dari sebelum data benar-benar terkumpul sampai dengan penulisan laporan penelitian.

Tahapan-tahapan analisis data kualitatif meliputi (Miles dan Huberman, 1984); pertama, reduksi data intinya mengurangi atau membuang data yang tidak relevan yang ada pada transkrip wawancara dan hasil FGD sehingga data terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Kemudian kedua, penyajian data yaitu menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti cuplikan percakapan, catatan wawancara dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Ketiga, pengambilan keputusan dan verifikasi yaitu menyimpulkan dan mengecek ulang data yang telah direduksi dan disajikan. Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran KUR

Program KUR memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu meningkatkan dan memperluas pembiayaan kepada usaha produk, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sekaligus pula percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam pada itu, rumah tangga yang tergolong “hampir miskin” sebagai pelaku usaha mikro dan kecil baik individu (perorangan), kelompok usaha maupun badan usaha sepanjang memiliki usaha yang produktif dan layak

dapat mengajukan KUR ke BRI Cabang Selong melalui BRI Unit yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Firdaus (2014) bahwa pelaku usaha mikro dan kecil umumnya kesulitan untuk memperoleh kredit perbankan karena keterbatasan dalam kepemilikan aset yang secara formal dapat digunakan sebagai agunan (kolateral). Oleh karena itu, dalam program KUR tersebut, agunan (kolateral) bukanlah persyaratan wajib.

Usaha produktif yang diusulkan ke BRI Cabang Selong; melalui BRI Unit yang tersebar di 20 kecamatan, untuk memperoleh KUR hendaknya memiliki ijin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kepala Pasar. Sektor usaha yang dapat diusulkan meliputi sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, jasa-jasa dan konstruksi) dan sektor perdagangan. Misalnya, untuk usaha produktif di sektor perdagangan yang berada di pasar, ijin usaha dapat diterbitkan oleh Kepala Pasar. Sementara, usaha produktif di sektor pertanian misalnya dapat diterbitkan oleh Kepala Desa maupun Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Disisi lain, usaha produktif yang diusulkan bisa berupa usaha yang telah ada atau usaha baru sepanjang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.

Berdasarkan usulan (permohonan) KUR yang masuk di BRI Unit kemudian Petugas BRI Unit melakukan survei kelayakan terhadap usaha produktif yang diusulkan. Setelah dinilai layak, BRI Unit melakukan pencairan KUR terhadap pemohon. Nilai pencairan tergantung pada jenis usaha pemohon. Jika usaha pemohon tergolong usaha mikro, maka pemohon akan memperoleh pinjaman KUR maksimal sebesar Rp. 25 juta per akad kredit dengan suku bunga 7 persen efektif per tahun. Namun jika usahanya tergolong usaha kecil, ia akan memperoleh pinjaman KUR berkisar antara Rp.25 juta hingga Rp.500 juta juga dengan suku bunga 7 persen efektif per tahun. Suku bunga 7 persen efektif per tahun tersebut berlaku sejak 1 Januari 2018 atau mengalami penurunan dibandingkan suku bunga pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 9 persen pada tahun 2017 dan 12 persen pada tahun 2016.

Jangka waktu pengembalian KUR pun berbeda-beda, tergantung pada jenis KUR yang diusulkan. Jika KUR yang diusulkan adalah kredit modal kerja untuk usaha mikro; maka jangka waktu pengembalian paling lambat 3 tahun dan jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 4 tahun dan manakala usulannya adalah kredit investasi untuk usaha mikro; maka jangka waktu pengembalian paling lambat 5 tahun dan jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun. Dalam pada itu, jika KUR yang diusulkan berupa kredit modal kerja untuk usaha kecil; maka jangka waktu pengembalian paling lambat 4 tahun dan jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 5 tahun; sementara kredit investasi untuk usaha kecil; jangka waktu pengembalian paling lambat 5 tahun dan jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun. Disisi lain, suku bunga KUR, jangka waktu pengembalian, dan batas maksimum per akad kredit ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Suku bunga, Jangka Waktu Pengembalian, Batas Maksimum

Komponen KUR	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Suku bunga	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun
Jangka Waktu Pengembalian	* <i>Kredit Model Modal Kerja</i> (Paling lambat 3 tahun jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 4 tahun) * <i>Kredit Investasi</i> (Paling lambat 5 tahun jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun)	* <i>Kredit Model Modal Kerja</i> (Paling lambat 3 tahun jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 4 tahun) * <i>Kredit Investasi</i> (Paling lambat 5 tahun jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun)
Batas maksimum per akad kredit	Rp.25 juta	Rp.25 juta-Rp.500 juta

Sumber : Anonim (2018)

Nilai penyaluran KUR yang telah direalisasikan oleh BRI Cabang Selong pada tahun 2017 di Kabupaten Lombok mencapai Rp. 287 milyar dari target sebesar Rp.229 milyar atau sebesar 125,32 persen dari target. Artinya realisasi penyaluran KUR oleh BRI Cabang Selong di Kabupaten Lombok Timur telah melampaui target. Disisi lain, KUR pada tahun 2017 oleh BRI Cabang Selong direalisasikan pada 15.167 penerima KUR (debitor) dari target sebanyak 11.456 debitor atau sebesar 132,39 persen dari target. Ini berarti bahwa tidak hanya realisasi nilai penyaluran KUR yang telah melampaui target, melainkan juga jumlah debitor. Target penyaluran KUR oleh BRI Cabang Selong pada tahun 2018 sejumlah Rp.287 milyar

dan realisasinya hingga Juni 2018 mencapai Rp.157 milyar (54,70 persen dari target) pada sejumlah 7.560 debitor.

Galat Penerima KUR

Rumah tangga dengan pengeluaran per kapita rata-rata dibawah garis kemiskinan termasuk dalam kategori “miskin”.Sedangkan, rumah tangga dengan pengeluaran per kapita rata-rata sedikit diatas garis kemiskinan termasuk dalam kategori “hampir miskin” (Suryahadi Asep, 2012).Kendati demikian, Suryahadi Asep (2012) menyatakan bahwa rumah tangga dengan kategori “hampir miskin” dengan mudah dapat terjerebakkembali menjadi “miskin” bila terjadi goncangan tertentu seperti konflik sosial, bencana alam, gagal panen, kecelakaan, menderita sakit, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian diperoleh bahwa rumah tangga yang tergolong dalam kategori “hampir miskin” adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kisaran Rp.397.125-Rp.399,367. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga yang tergolong dalam kategori “hampir miskin” di lokasi penelitian berada sedikit diatas garis kemiskinan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017yang ditetapkan BPS sebesar Rp.396.668 per kapita per bulan (BPS Lombok Timur, 2017).

Istilah yang digunakan masyarakat setempat untuk menyebut rumah tangga yang tergolong dalam kategori “hampir miskin” itu adalah “*cukupan*”, artinya di satu sisi mereka tidak lagi termasuk dalam kategori “miskin”, namun di sisi lain mereka juga belum termasuk dalam kategori “kaya”.Rumah tangga “hampir miskin” tersebut adalah pelaku usaha mikro dan kecil.Menurut Firdaus (2014) pelaku usaha mikro dan kecil memiliki keengganaan untuk mengambil kredit dari perbankanalasanya karena keterbatasan asset yang dimilikinya sebagai agunan (kolateral). Berbeda dengan program KUR, agunan (kolateral) bukanlah menjadi persyaratan wajib, sehingga telah banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan sebagai penerima KUR sebagaimana dipaparkan oleh seorang informan A: “*saya punya usaha kecil-kecilan dan perlu tambahan modal. Di BRI ada kredit yang tidak mengharuskan adanya agunan, namanya KUR.Dan saya telah mengajukan KUR sebagai tambahan modal*”. Disisi lain, pelaku usaha mikro dan kecil juga memiliki keengganaan berhubungan karena rumitnya proses pengurusan kredit.Namun proses pengurusan KUR tidak rumit seperti diungkapkan oleh seorang informan B: “*proses ngurus KURitu tidak rumitdan cepet cairnya*”.

Berdasarkan penilaian pemangku kepentingan di lokasi penelitian bahwa karakteristik usaha yang digeluti oleh rumah tangga “hampir miskin” tergolong usaha mikro dan kecil.Oleh karena itu, berkaitan dengan galat eksklusi (*exclusion error*) rumah tangga “hampir miskin” yang menjadi penerima KUR (debitor) tetapi tidak menjadi debitor.Berdasarkan hasil FGD diperoleh galat eksklusi (*exclusion error*) KUR di lokasi penelitian tergolong tinggi, yakni pada kisaran 75,76 persen hingga 83,78 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2.Galat Penerima KUR Hasil FGD

Kecamatan	Cakupan FGD	<i>Inclusion error</i>	<i>Exclusion error</i>
Sakra Barat	Rukun tetangga	5	31 dari 37 (83,78%)
Selong	Rukun tetangga	3	25 dari 33 (75,76%)

Sumber : Data primer (diolah)

Tingginya galat eksklusi (*exclusion error*) tersebut menggambarkan masih sangat banyak rumah tangga “hampir miskin” di lokasi penelitian yang tidak menjadi penerima KUR (debitor). Berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan BPS pada tahun 2016 diperoleh total rumah tangga pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lombok Timur mencapai 99,59 persen atau sebanyak 148,69 ribu (BPS Lombok Timur, 2017). Sementara, pelaku usaha mikro dan kecil sebagai penerima KUR (debitor) dari BRI Cabang Selong pada tahun 2017 hanya sebanyak 15.167 atau 10,20% dari total usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Lombok Timur.Dalam pada itu, ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak rumah tangga “hampir miskin” yang tidak menerima KUR yang tercermin dalam tingginya galat eksklusi (*exclusion error*).

Meskipun galat eksklusi (*exclusion error*) tergolong tinggi, tetapi galat inklusi (*inclusion error*) tergolong rendah sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan rendahnya galat inklusi (*inclusion error*) menunjukkan bahwa penyaluran KUR oleh BRI Cabang Selong tepat sasaran. Kendati demikian, rendahnya galat inklusi (*inclusion error*) itu juga mengindikasikan bahwa masih ada rumah tangga “non-hampir” yang bukan menjadi penerima KUR (debitor), tetapi menjadi debitor. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk mengantisipasi kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik sosial.Kegiatan sosialisasi ini hendaknya dilakukan oleh TDP2K Kabupaten Lombok Timur.

Manajemen Strategis

Sebelumnya telah dibahas bahwa galat penerima KUR memiliki kaitan dengan semakin dalam dan parahny kemiskinan. Dalam pada itu, galat penerima KUR di Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan semakin dalamnya dan parahny kemiskinan yang diindikasikan masing-masing oleh naiknya Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Povertry Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) dalam periode 2013-2015 dan periode 2016-2017. Hal ini berimplikasi pada laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur yang berjalan sangat lamban, sehingga prosentase kemiskinan (*Head Count Index*) di Kabupaten Lombok Timur selalu berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Lombok Utara yang berada pada peringkat pertama (BPS Lombok Timur, 2017).

Sangat lambannya penurunan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur terjadi karena cukup banyak rumah tangga “hampir miskin” di lokasi penelitian yakni 15,15 persen hingga 16,22 persen yang justru terjerebab kembali dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka kembali “miskin” sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Rumah Tangga “Hampir miskin” kembali “Miskin”

Kecamatan	Cakupan FGD	“Hampir miskin” kembali “miskin”	Jenis usaha
Sakra Barat	Rukun Tetangga	6 dari 37 (16,22%)	Sektor produksi
Selong	Rukun Tetangga	5 dari 33 (15,15%)	Sektor produksi

Sumber : Data primer (diolah)

Di satu sisi implementasi dari berbagai progarm penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan langsung maupun pemberdayaan telah banyak mengangkat kehidupan rumah tangga “miskin” ke atas garis kemiskinan, sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Namun disisi lain, juga cukup banyak rumah tangga “hampir miskin” yang kehidupannya sedikit diatas garis kemiskinan justru kembali terperangkap dibawah garis kemiskinan yang menyebabkan mereka kembali “miskin”.

Berkaitan dengan hal tersebut, makaisu strategisnya adalah cukup banyak rumah tangga “hampir miskin” yang kembali “miskin”. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan untuk mengatasi galat penerima KUR adalah ekstensifikasi layanan. Ekstensifikasi ini menjadi penting karena realisasi pemberian KUR (debitor) oleh BRI Cabang Selong hanya sejumlah 15.167 debitor (10,20% dari total usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Lombok Timur). Dalam pada itu, peningkatan cakupan layanan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan bank penyalur KUR lainnya yang beroperasi di Kabupaten Lombok Timur seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank NTB.

Disisi lain, rumah tangga “hampir miskin” pelaku usaha mikro dan kecil di lokasi penelitian juga mengeluhkan tingginya biaya produksi, sementara produktivitas cenderung stagnan dan pada gilirannya berdampak terhadap penurunan pendapatan sebagaimana dipaparkan oleh seorang informan C memiliki usaha mikro di sektor produksi (pertanian): “biaya produksi yang saya keluarkan makin tinggi, tetapi tidak sepadan dengan pendapatan yang saya dapatkan”. Akibat stagnannya produktivitas dan turunnya pendapatan, usaha yang digelutinya mengalami goncangan dan akhirnya bangkrut. Kebangkrutan berdampak pada terjerebabnya rumah tangga “hampir miskin” kembali dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka kembali “miskin”. Untuk itu, setelah dilakukan ekstensifikasi layanan perlu disertai dengan intensifikasi usaha, yakni peningkatan produktivitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Mekanisme untuk memperoleh KUR, usaha produktif (mikro dan kecil) diusulkan oleh pemohon ke BRI Cabang Selong; melalui BRI Unit yang tersebar di 20 kecamatan setelah memiliki ijin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kepala Pasar. Usaha produktif yang diusulkan bisa berupa usaha di sektor produksi dan perdagangan yang telah ada atau usaha baru yang telah berjalan minimal selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan usulan permohonan kemudian Petugas BRI Unit melakukan survei kelayakan terhadap usaha produktif yang diusulkan. Setelah dinilai layak, BRI Unit melakukan pencairan KUR terhadap pemohon selaku penerima KUR (debitor).
2. Galat penerima KUR meliputi galat eksklusi (*exclusion error*) dan galat inklusi (*inclusion error*). Nilai galat eksklusi tergolong tinggi yang menggambarkan masih sangat banyak rumah tangga “hampir miskin”

yang tidak menjadi penerima KUR (debitor). Sebaliknya nilai galat inklusi tergolong rendah yang menunjukkan bahwa penyaluran KUR oleh BRI Cabang Selong tepat sasaran.

3. Manajemen strategis untuk mengatasi galat eksklusi (*exclusion error*) meliputi ekstensifikasi layanan KUR dan intensifikasi usaha berupa peningkatan produktivitas. Sementara, manajemen strategis untuk galat inklusi (*inclusion error*) adalah mengantisipasi timbulnya konflik sosial melalui kegiatan sosialisasi.

Saran

1. Kegiatan sosialisasi oleh TDP2K Kabupaten sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan partisipasi pemerintah desa termasuk “*sharing pendanaan*” dari pemerintah desa.
2. Perlu dilakukan koordinasi berkala antara TDP2K Kabupaten dengan Bank Penyalur KUR dan BPS untuk mengetahui perkembangan realisasi KUR dan permasalahannya serta capaian indikator kemiskinan.
3. Perlu dilakukannya pemutakhiran berkala data rumah tangga “hampir miskin” termasuk rumah tangga “miskin” dan “sangat miskin” oleh TDP2K Kabupaten, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai basis data terpadu oleh pemerintah daerah, perbankan, dan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2018. *Kebijakan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- BPS, 2011. *Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011: Pedoman PCL*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Lombok Timur, 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Selong.
- Budiyanto IM, 2002. *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*. Wedatamawidya Sastra, Jakarta
- Creswell JW., 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Denzin NK dan Lincoln YS, 2009. *Hand Book of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firdaus, M, 2014. *Ketimpangan Kredit di Sektor Perbankan dalam Yustinus Prastowo (ed): Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek*. INFID, Jakarta.
- Hastuti et al, 2016. *Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. The SMERU Research Institute, Jakarta.
- Hidayat Dedy N., 2002. *Metodologi Penelitian dalam Sebuah “Multi Paradigma Science”*. Mediator, Vol.3 No.2:197-219.
- Miles MB dan Huberman AM, 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcesbook of New Methods*. Sage Publication, Baverly Hill, London.
- SMERU, 2017. *Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret*. Buletin SMERU No.2/207:1-5.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suryahadi Asep et al, 2012. *Accelerating Poverty and Vulnerability Reduction: Trends, Opportunities, and Constraints*. Working Paper, SMERU Research Institute, Jakarta.